

## KONFLIK GAZA DAN DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PALESTINA

Simela Victor Muhamad\*

### Abstrak

Konflik Gaza yang hingga kini masih berlangsung menimbulkan keprihatinan internasional. Masyarakat internasional, melalui jalur diplomasi, harus terus mengupayakan dihentikannya konflik Gaza. Lebih jauh dari itu, upaya penghentian konflik Gaza juga harus diikuti dengan penguatan diplomasi untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Tulisan ini menganalisis pentingnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk segera menghentikan konflik Gaza dan melalui jalur diplomasi terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Pentingnya masyarakat internasional untuk segera menghentikan konflik Gaza adalah untuk mencegah dampak yang lebih luas dari konflik tersebut, baik dampak internal di Gaza (Palestina) maupun terhadap kawasan. Diplomasi untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang terbebas dari penjajahan zionis Israel juga perlu terus diupayakan, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya kemerdekaan Palestina.

### Pendahuluan

Konflik Israel-Hamas di Gaza yang telah melewati 100 hari dan masih berlangsung hingga kini menimbulkan keprihatinan internasional (“International Concern Grows”, 2024). Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas di wilayah Palestina yang dilanda perang, setidaknya hingga 20

Januari 2024, telah mencapai 25.000 jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Hal tersebut terjadi ketika Israel melancarkan serangannya ke selatan dan kembali melakukan pengeboman di wilayah utara (“Miris! Korban Tewas”, 2024). Korban aksi kekerasan Israel dipastikan bertambah, pasalnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum akan

\* Analis Legislatif Ahli Utama, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Email: simela.muhamad@dpr.go.id.



menghentikan serangan pasukannya ke Gaza yang dikuasai oleh Hamas.

Oleh karena itu, masyarakat internasional melalui jalur diplomasi di berbagai forum internasional harus terus menyuarakan dan mengupayakan dihentikannya aksi kekerasan di Gaza. Lebih jauh dari itu, upaya penghentian kekerasan di Gaza harus diikuti dengan penguatan diplomasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina di tanah airnya sendiri. Konflik Israel-Hamas di Gaza terjadi karena bangsa Palestina belum merdeka, bangsa Palestina masih di bawah penjajahan zionis Israel. Hingga saat ini “solusi dua negara” masih menjadi opsi yang terus diperjuangkan masyarakat internasional.

Tulisan ini menganalisis pentingnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk terus mengupayakan dihentikannya konflik Gaza, dan melalui jalur diplomasi terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. DPR RI, melalui jalur diplomasi parlemen, juga harus menjadi bagian dari pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina.

### **Mencegah Dampak Konflik**

Pentingnya masyarakat internasional menghentikan konflik Gaza adalah untuk mencegah dampak konflik yang lebih luas. Secara internal di Gaza, serangan Israel lewat darat, laut, dan udara di Jalur Gaza telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar terhadap infrastruktur penting yang menjadi kebutuhan primer warga Palestina. Data Kantor Media Pemerintah Palestina pada akhir Desember 2023 menyebutkan,

serangan zionis Israel telah menghancurkan 70% rumah-rumah di Gaza. Selain itu, lebih dari 200 situs bersejarah dan arkeologi serta ratusan infrastruktur penting juga hancur (“Israeli Bombardment Destroyed”, 2023). Infrastruktur penting yang hancur, antara lain, adalah rumah sakit yang dalam situasi konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban perang.

Pentingnya masyarakat internasional menghentikan konflik Gaza juga untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar dari warga sipil Palestina yang bermukim di Jalur Gaza. Korban jiwa warga Palestina yang telah melampaui 25.000 jiwa, sebagaimana diberitakan media PBB pada 22 Januari 2024 (“25,000 Civilians Killed”, 2024), diharapkan tidak terus bertambah. Sangat mungkin, jumlah korban jiwa jauh lebih tinggi dari pada data yang diberitakan media, karena hal tersebut tidak termasuk jenazah yang terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang hancur atau mereka yang tidak dibawa ke rumah sakit. Yang lebih penting lagi, penghentian konflik di Gaza juga untuk mencegah kemungkinan aksi Israel yang lebih brutal, yaitu tindakan genosida terhadap warga Palestina.

Urgensi menghentikan konflik Gaza juga untuk mencegah terjadinya instabilitas kawasan. Ada kekhawatiran di masyarakat internasional bahwa konflik Gaza yang semula hanya melibatkan Israel dan Hamas dapat meluas dan melibatkan negara-negara di

kawasan, bahkan non kawasan, dan berdampak pada stabilitas kawasan dan global (“Spillover Effect of Gaza”, 2024). Oleh karenanya, menjadi penting bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, untuk mengupayakan dihentikannya konflik dan aksi kekerasan yang masih terus terjadi di Gaza.

Melalui Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB, pada 23 Januari 2024, Menlu RI Retno Marsudi dengan tegas menyuarakan pentingnya penghentian konflik Gaza (Kompas, 2024). Menlu Retno mengajukan tiga tuntutan dalam Debat Terbuka DK PBB tersebut, yaitu gencatan senjata permanen sesegera mungkin, penghentian pasokan senjata ke Israel, dan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Hal tersebut penting untuk ditegaskan agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan “solusi dua negara” serta mencegah kekejaman lebih lanjut oleh Israel. Itu artinya, Indonesia perlu mengingatkan DK PBB, yang memiliki mandat memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk tidak menoleransi terjadinya perang apalagi genosida.

### **Diplomasi Terkait Palestina**

Tidak cukup dengan upaya menghentikan konflik Gaza, langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat diplomasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Langkah diplomasi Indonesia untuk ikut mengupayakan kemerdekaan Palestina, sebagai tindak lanjut

dari Konferensi Asia Afrika 1955 yang menjunjung semangat kemerdekaan dan anti-penjajahan, adalah menjadikan Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai salah satu forum internasional bagi perjuangan diplomasi Indonesia terkait Palestina (“Menlu RI: GNB”, 2022). GNB, yang kini beranggotakan 121 negara (lima di antaranya menjadi anggota tidak tetap DK PBB), memiliki posisi strategis dan harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-19 di Kampala, Uganda, 19-20 Januari 2024, Indonesia kembali menegaskan posisinya terkait Palestina. Indonesia, selain mendesak GNB agar bersatu mengupayakan gencatan senjata di Gaza, juga mendorong proses perdamaian Palestina untuk dihidupkan kembali. Indonesia juga mendorong agar GNB mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB (Media Indonesia, 2024). Langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa GNB merupakan kekuatan politik yang sangat besar, dan dengan lima anggotanya saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB, GNB diharapkan bisa menyuarakan posisi bersama terkait Palestina.

Selain di GNB, Indonesia juga selalu konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di forum PBB, seperti yang dilakukan Menlu RI di forum Debat Terbuka DK PBB pada 23 Januari 2024 lalu. Posisi Indonesia terkait Palestina, antara lain mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera,

dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “solusi dua negara” (*two-state solution*). Dunia internasional saat ini masih terus mendorong terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel berdasarkan prinsip “solusi dua negara” (Kompas, 2024). Namun, berbagai tantangan masih menghadang perjalanan proses perdamaian di antara keduanya.

Oleh karena itu, dalam kerangka diplomasi terkait Palestina, Indonesia perlu mengingatkan dan mendorong agar DK PBB mengeluarkan keputusan yang produktif bagi penyelesaian masalah Palestina, sebagai cerminan tanggung jawab DK PBB sebagai organ utama PBB yang mengurus pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sejalan dengan itu, diplomasi terkait Palestina juga harus menegaskan kembali posisi Indonesia untuk terus mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional serta mengembalikan sentralitas isu Palestina di dunia internasional di tengah konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah saat ini.

Untuk memperkuat diplomasi terkait Palestina, parlemen juga harus menjadi bagian dari upaya untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina di forum internasional, khususnya forum antarparlemen. DPR RI, yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen (seperti melalui forum *Inter-Parliamentary Union/ IPU*), perlu untuk terus menjalankan dan

meningkatkan peran diplomasinya tersebut.

Di forum Sidang Umum ke-147 IPU di Luanda, Angola, 24 Oktober 2023 lalu, DPR RI mengajukan draf resolusi terkait Palestina, yang menekankan empat poin, yaitu mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza melalui gencatan senjata, membuka blokade Gaza untuk akses kemanusiaan, meminta komunitas internasional untuk lebih objektif dan adil serta bersama-sama menemukan solusi jangka panjang bagi perdamaian di Palestina. Konflik Gaza harus dijadikan momentum bagi parlemen, termasuk DPR RI, untuk memperkuat dan menegaskan dukungan politik bagi terbentuknya negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

## Penutup

Konflik Gaza yang masih berlangsung harus disikapi oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dengan mendesak DK PBB untuk segera menghentikan konflik tersebut. Pentingnya masyarakat internasional untuk segera menghentikan konflik Gaza adalah untuk mencegah dampak konflik yang lebih luas, baik dampak internal di Gaza (Palestina) maupun terhadap kawasan. Lebih lanjut, diplomasi perdamaian untuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip “solusi dua negara” perlu terus disuarakan dan diupayakan masyarakat internasional.

DPR RI, yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi parlemen, juga perlu terus menjalankan dan meningkatkan peran diplomasinya untuk mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri, juga perlu terus mencermati perkembangan konflik Gaza dan melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengupayakan terwujudnya kemerdekaan Palestina.

## Referensi

- Dunia Desak Israel Terima Solusi Dua Negara. (2024, Januari 23). *Kompas*, hlm. 4.
- Indonesia Desak Embargo Senjata ke Israel. (2024, Januari 25). *Kompas*, hlm. 4.
- International concern grows as Gaza conflict hits 100 days. (2024). <https://news.cgtn.com/news/2024-01-15/International-concern-grows-as-Gaza-conflict-hits-100-days-1qnLPVqAiS4/p.html>.
- Israeli bombardment destroyed over 70% of Gaza homes: Report. (2023, December 31). <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/31/israeli-bombardment-destroyed-over-70-of-gaza-homes-media-office>.
- Menlu RI: GNB masih berutang atas kemerdekaan Palestina. (2022). <https://www.antarane.ws.com/berita/3138985/menlu-ri-gnb-masih-berutang-atas-kemerdekaan-palestina>.
- Miris! Korban Tewas Akibat Serangan Israel ke Gaza Tembus 25 Ribu Jiwa. (2024). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240121175419-4-507621/miris-korban-tewas-akibat-serangan-israel-ke-gaza-tembus-25-ribu-jiwa>.
- RI Dorong Keanggotaan Penuh Palestina di PBB. (2024, Januari 22). *Media Indonesia*, hlm. 14.
- Spillover effect of Gaza War Heightens Concern. (2024). <https://www.globaltimes.cn/page/202401/1304949.shtml>.
- 25,000 Civilians Killed in Gaza War as Humanitarian Needs Go on Rising. (2024). <https://palestine.un.org/en/258474-25000-civilians-killed-gaza-war-humanitarian-needs-go-rising>.